

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGAWAS

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Telp (0322) 321019 - 321144



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	IV
BAB. I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Ketedukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	2
B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	4
1. Faktor Pendorong	4
2. Faktor Penghambat	5
BAB. II RENCANA STRATEGIK	4
A. GAMBARAN SINGKAT SASARAN YANG INGIN DICAPAI BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN	6
B. VISI, MISI DAN NILAI	6
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2003	12
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003	15
A. PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN KE II (2003)	15
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	23
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan	23
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran	27
C. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	29
D. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN	31
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
BAB. IV PENUTUP	37

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Rencana Strategis Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2002 – 2006 Form. RS
3. Rencana Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Form. RKT.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Renstra Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan yang di dukung sarana dan prasarana yang memadai;
- 2) Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang baik melalui optimalisasi Pengawasan kinerja yang terarah dan terprogram pada unit-unit kerja Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- 3) Meningkatkan sistem pengawasan yang profesional secara terprogram dan terarah guna menghindari adanya tumpang tindih pengawasan;
- 4) Mewujudkan pelaporan hasil pengawasan yang efektif dan berkualitas;
- 5) Meningkatkan iklim yang mencegah KKN di lingkungan Aparatur Pemerintahan;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan yang di dukung sarana dan prasarana yang memadai;
- 2) Diperolehnya hasil pengawasan yang berkesinambungan disertai meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 80 %;
- 3) Terhindarnya tumpang tindih pengawasan;
- 4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Terwujudnya Pengawasan pada setiap unit kerja Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Sampai dengan tahun 2003 atau tahun ke II dari lima tahun jangka waktu Perencanaan Strategis Badan Pengawas Kabupaten Lamongan. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai sejauh sebagai berikut :

- 1) Kualitas SDM pengawasan di Badan Pengawas Kabupaten Lamongan setiap tahun di upayakan peningkatannya dan dalam tahun 2003 Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dengan bekerja sama dengan BPK Perwakilan III di Yogyakarta melaksanakan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja untuk mengantisipasi adanya perubahan pengelolaan Keuangan Daerah ke Anggaran Kinerja.
- 2) Sesuai usulan ke APBD Kabupaten Lamongan tahun 2003 Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah memperoleh tambahan sarana dan prasarana guna mendukung operasional pengawasan sebagai berikut :
 - (1) 1 (satu) Unit Mobil roda 4 Suzuki Cerry dan 2 (dua) Sepeda Motor sehingga jumlah kendaraan roda empat di Badan Pengawas ada 4 (empat) unit.
 - (2) Prasarana berupa bangunan gedung ruang pemeriksaan dan garasi mobil.
 - (3) Sarana perkantoran berupa :
 - 1 (satu) buah Tabung PMK;
 - 2 (dua) Unit Computer;
 - 2 (dua) Filling Cabinet;
 - 1 Meja Pimpinan eselon II;
 - 10 Meja rapat;
 - 40 kursi lipat rapat.
- 3) Seluruh unit kerja Perangkat Daerah serta BUMD yang ada dalam tahun 2003 telah terjangkau Pemeriksaan seluruhnya, namun tindak lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2003 terealisasi 77,7 dari target 80 %.
- 4) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan, disikapi dengan melalui jadwal kegiatan pemeriksaan yang terprogram setiap tahun sehingga dalam tahun 2003 tidak pernah terjadi adanya tumpang tindih pengawasan tersebut.
- 5) Terjangkaunya pemeriksaan kinerja pada seluruh unit kerja Perangkat daerah maupun BUMD setiap tahun secara berlanjut, hal tersebut sudah barang tentu akan mendorong

terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menumbuhkan iklim yang mencegah KKN di lingkungan Aparatur Pemerintah.

- 6) Dilaksanakannya Pemantauan Pelayanan Publik pada Instansi unit kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik diarahkan pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang secara berangsur-angsur akan membaik.

3. Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Kendala yang dihadapi adalah mengenai tenaga, dana dan sarana pendukung Tugas Operasional pengawasan. Mengenai tenaga Pengawas baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas masih terbatas bila dibandingkan dengan obyek pengawasan yang ada.

4. Langkah untuk mengatasi kendala tersebut melalui :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan melalui Diklat Teknis / Workshop secara berlanjut dari tahun ke tahun.
- 2) Mengusulkan dana, sarana dan prasarana pendukung tugas operasional pengawasan secara bertahap dari tahun ke tahun melalui APBD Kabupaten.
- 3) Meningkatkan tenaga, dana dan sarana yang sangat terbatas tersebut sebagai langkah antisipasi untuk tahun yang akan datang perlu disikapi dengan penyusunan jadwal pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi Fregwensi kegiatan unit kerja obyek pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien.

Lamongan, 12 Januari 2004

**KEPALA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN LAMONGAN**



SUPARDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 164 744



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PENGAWAS

Jalan Basuki Rachmad No. 209 Telp. (0322) 321019 – 321144

E – Mail : bawas@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

L A M O N G A N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN

(TAHUN 2003)

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan akuntabilitas pimpinan Instansi dalam hal ini Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan /program tahun 2003 dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam mempertimbangkan kekuatan / kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dan peluang, tantangan atau kendala yang dihadapi oleh organisasi.

Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah diberi mandat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2000 dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Badan Pengawas Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

1. *Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengawasan*
2. *Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan*
3. *Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan dan BUMD, Pembangunan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat*
4. *Pengujian dan Penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah.*
5. *Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah*
6. *Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas*
7. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas*
8. *Pelaksanaan ketata usahaan dan rumah tangga Badan Pengawas*
9. *Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

3. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. *Kepala Badan Pengawas*
2. *Sekretariat :*
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan :

- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
- b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah
- c. Sub Bidang Pertanahan

4. Bidang Keuangan, Peralatan, Perlengkapan dan BUMD :

- a. Sub Bidang Keuangan.
- b. Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan
- c. Sub Bidang BUMD

5. Bidang Ekonomi dan Penibangunan ;

- a. Sub Bidang Pertanian dan Industri
- b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
- c. Sub Bidang Bangda dan Proyek-proyek Program Bantuan Pembangunan

6. Bidang Kesejahteraan Sosial ;

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Agama
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

7. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

- a. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Anforjab
- b. Sub Bidang Bina Aparatur.
- c. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(Struktur organisasi terlampir)

B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kondisi lingkungan Strategis baik lokal, regional maupun nasional saat ini utamanya terkait dengan kondisi nasional yang mendorong dilakukannya reformasi diantaranya bidang manajemen pemerintahan telah ditetapkannya TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 merupakan lingkungan strategis secara nasional yang mendasar. Upaya yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pembangunan pada prinsip-prinsip Good Governance. Disamping kondisi lingkungan eksternal, tidak lepas dari lingkungan internal organisasi yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah diprogramkan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dibidang Pengawasan.

Secara umum faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam mensukseskan program kerja dibidang Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. *Faktor Pendorong*

Kekuatan dan kemampuan Internal yang bersifat positif memungkinkan organisasi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasaraannya maupun peluang yakni situasi dan faktor-faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi mencapai sasaraannya secara rinci terdiri dari :

- a. Adanya dukungan Anggaran belanja dari APBD II
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bupati Lamongan No. 26 Tahun 2001
- c. Tersedianya prasarana perkantoran yang memadai
- d. Sebagian besar SDM nya telah memiliki pengalaman sebagai pemeriksa
- e. Terjalannya koordinasi yang mantap antar bidang
- f. Terbitnya Keppres No 74 Tahun 2001
- g. Terjalannya koordinasi antar aparat fungsional pengawasan

- h. Pengaruh tuntutan reformasi dan Transparansi sosial yang terus berkembang
- i. Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur Tupoksi Instansi Obrik
- j. Undang-Undang No 28 Tahun 1998 dan Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. *Faktor Penghambat*

Faktor penghambat yang berupa kelemahan atau situasi dan ketidakmampuan internal organisasi, serta tantangan atau faktor-faktor eksternal yang bersifat negatif yang dapat menyebabkan organisasi tidak mencapai sasarannya terdiri :

- a. Minimnya dana kegiatan pengawasan;
- b. Kurangnya sarana yang memadai dalam rangka pelaksanaan program pengawasan;
- c. Minimnya pengetahuan/ketrampilan Teknis konstruksi bagi SDM pengawasan;
- d. Kurangnya tenaga staf;
- e. Belum tersedianya teknologi informasi yang memadai;
- f. Makin meningkatnya aktifitas pengawasan legislatif dan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Masih melekatnya budaya ewuh pakewuh;
- h. Penyedia jasa umumnya cenderung mencari keuntungan lebih daripada mengutamakan kualitas pekerjaan/jasa;
- i. Masih melekatnya budaya KKN dilindungan aparat/masyarakat;
- j. Meningkatnya perubahan sosial dibidang pengawasan;
- k. Luasnya jangkauan wilayah pengawasan;
- l. Belum dilaksanakannya sistem pengawasan melekat secara maksimal.

BAB II RENCANA STRATEJIK

A. GAMBARAN SINGKAT SASARAN YANG INGIN DICAPAI BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003

Dalam rencana Stratejik Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006, sasaran yang ingin dicapai Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 sebagaimana Form RS terlampir, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan yang di dukung Sarana dan Prasarana yang memadai ;
2. Diperolehnya hasil Pengawasan yang berkesinambungan disertai meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 80 %;
3. Terhindarnya tumpang tindih Pengawasan ;
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Terwujudnya Pengawasan pada setiap Unit kerja Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

Sebagaimana Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam tahun 2003 tersebut diatas diharapkan misi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yakni : “ **Terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang Profesional** “ akan dapat terwujud.

B. VISI, MISI DAN NILAI

1. *Pernyataan Visi*

Terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional.

2. *Penjelasan Makna*

Pemerintahan/Kepemerintahan adalah proses penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan penyediaan berbagai pelayanan umum yang baik dan memuaskan. Good Governance merupakan praktek terbaiknya dalam proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dimaksud. Terwujudnya Pemerintahan yang baik merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna dan bebas dari KKN. Dari hasil Pemeriksaan pada unit-unit kerja selama ini dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan masih dijumpai temuan-temuan penyimpangan, oleh karena itulah Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menentukan visinya yang merupakan keinginan bagaimana pemerintahan yang baik terwujud melalui pengawasan yang profesional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.

3. *Pernyataan Misi*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Misi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang profesional didukung sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatkan sistem Informasi pengawasan yang berkualitas dan berkesinambungan
3. Menumbuhkan komitmen pemerintah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan penyimpangan
5. Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau peniadaan penyimpangan

4. *Penjelasan Masing-masing Misi*

- ***Misi 1 (satu)***

Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang profesional didukung sarana dan prasarana yang memadai Pengawasan akan terus ditingkatkan baik melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian maupun penilaian terhadap obyek pemeriksaan. Pengawasan

dilaksanakan secara profesional oleh SDM pengawasan yang berkualitas yang mampu dan mumpuni dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap, sehingga diharapkan kualitas hasil pengawasanpun akan terus meningkat.

- **Misi 2 (dua)**

Meningkatkan sistem Informasi pengawasan yang berkualitas dan berkesinambungan. Dalam setiap langkah kegiatan pengawasan perlu adanya dukungan informasi obrik secara cepat dapat diperoleh utamanya laporan hasil pemeriksaan yang lalu, yang selama ini masih berupa dokumen himpunan LHP yang disimpan dalam rak arsip dan belum terprogram dalam komputer. Diharapkan dalam rangka terwujudnya pengawasan yang profesional perlu adanya sistem informasi pengawasan komputerisasi yang sistematis dan cepat ditemukan/dibutuhkan setiap saat.

- **Misi 3 (tiga)**

Menumbuhkan komitmen Pemerintah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar Akuntabilitas merupakan prinsip utama yang perlu terus ditingkatkan.

- **Misi 4 (empat)**

Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan penyimpangan. Dari hasil pengawasan/pemeriksaan akan diperoleh temuan pemeriksaan, dan dari temuan pemeriksaan akan diketahui penyebabnya yang berlanjut pada rekomendasi tindakan yang perlu diambil sebagai langkah perbaikan selanjutnya.

- **Misi 5 (lima)**

Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau peniadaan penyimpangan.

Dari hasil pengawasan yang profesional, dilaksanakan secara berkesinambungan dan dari temuan pemeriksaan akan ada rekomendasi perbaikan, sudah barang tentu hal ini akan menumbuhkan motivasi perbaikan pengurangan dan bahkan mungkin akan berdampak pada tiadanya penyimpangan sehingga Pemerintahan yang baik akan terwujud melalui pengawasan yang profesional tersebut.

5. **Nilai-Nilai**

Nilai adalah ukuran tentang kebenaran atau kebaikan yang diyakini dan ditetapkan dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan organisasi.

Nilai menjelaskan bagaimana kita dalam setiap harinya melakukan tugas kita masing-masing dalam rangka mencapai visi organisasi, bagaimana kita ingin bersikap terhadap satu sama lain didalam melaksanakan tugas, bagaimana menghargai pihak-pihak yang diperiksa, serta sebagai batas sejauh mana kita boleh melangkah. Nilai sangat baik apabila dijabarkan sepenuhnya dalam sikap dan atau perilaku sehari-hari, terutama harus ditunjukkan oleh pimpinan karena keteladanan bernilai berbagai ajakan.

Adapun nilai-nilai yang ditetapkan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai misinya adalah :

1) **Disiplin pribadi**

Setiap individu yang ada di Badan Pengawas sudah seharusnya mentaati segala aturan yang ada dalam berperilaku sehari-harinya maupun didalam melaksanakan tugas-pengawasan.

2) **Kecepatan**

Sebagai insan pengawas, harus serba cepat bersikap terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat yang terkait dengan tugas pengawasan dan cepat melaporkan hasil pengawasannya kepada pihak-pihak yang berwenang agar segera mengambil tindakan/langkah koreksi yang cepat dan tepat.

3) Kebersamaan

Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri.

4) Profesional

Kemampuan lebih yang dimiliki dalam menjalankan tugas profesinya (mumpuni) seorang pengawas harus lebih mumpuni daripada yang diawasi.

5) Keunggulan

Keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik.

6. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai organisasi. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan teknis yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengawasan Kinerja yang terarah, terprogram pada unit-unit kerja Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- 3) Meningkatkan sistem pengawasan yang profesional secara terprogram guna menghindari terjadinya tumpangtindih pengawasan
- 4) Mewujudkan pelaporan hasil Pengawasan yang efektif dan berkualitas
- 5) Meningkatkan iklim yang mencegah KKN di lingkungan Aparatur Pemerintahan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan yang didukung sarana dan Prasarana yang memadai ;

- 2) Diperolehnya hasil Pengawasan yang berkesinambungan disertai meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 80 % ;
- 3) Terhindarnya tumpang tindih Pengawasan ;
- 4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ;
- 5) Terwujudnya Pengawasan pada setiap unit kerja perangkat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

8. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya adalah :

- 1) Mengoptimalkan pendayagunaan sistim pengawasan Fungsional secara Profesional terhadap Instansi/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan melalui Pengawasan Reguler, Insidental maupun khusus.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap melalui usulan APBD.
- 3) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan Kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah yang memberi Pelayanan Publik.
- 4) Merekomendasikan tindakan hukum kepada Aparatur Pemerintah yang terbukti melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku.

9. Program

Setelah kebijakan-kebijaksanaan pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tersebut ditetapkan langkah selanjutnya adalah menjabarkannya kebijakan tersebut kedalam Program Operasional sebagai berikut :

- 1) Program Pendayagunaan Sistim dan Pengawasan.
- 2) Program Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pengawasan.
- 3) Program Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2003

Rencana Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam formulir RKT terlampir meliputi berbagai Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. *Program Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur, rencana kegiatannya :*

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan APIP dengan dana Rp. 91.850.000,-

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan APIP ini direncanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja bekerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan III Yogyakarta dan memberi bantuan biaya pengiriman aparatur Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang diikuti sertakan pelatihan / Work Shop ke tingkat Propinsi. Indikator keberhasilannya adalah terlatihnya / terbimbingnya SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam hal Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja sejumlah 30 Orang. Adapun pengiriman SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan pada Pelatihan / Work Shop ke Tingkat Propinsi jumlahnya sesuai dengan permintaan dari Tingkat Propinsi terhadap pelatihan / Work Shop yang diselenggarakan di Tingkat Propinsi.

2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rencana Kegiatannya :*

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dana yang disediakan Rp. 37.350.000,- guna mendukung tugas operasional Pengawasan perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap indikator keberhasilan kegiatan ini adalah tambahnya sarana peralatan kantor Badan Pengawas Kabupaten Lamongan berupa :

- 1 (satu) buah Tabung PMK;
- 2 (dua) Unit Computer;
- 2 (dua) buah Filling Cabinet;
- 1 (satu) Meja Kerja Eselon II;
- 10 (sepuluh) Meja Rapat;
- 40 (empat puluh) Kursi Rapat.

3. Program Pendayagunaan Sistim dan Pengawasan, kegiatannya meliputi :

- 1) Kegiatan Pemeriksaan Reguler berdasarkan PKPT tahun 2003.

Kegiatan Pemeriksaan Reguler ini dijadwalkan mulai Januari 2003 sampai dengan Nopember 2003 dengan sasaran obyek Pemeriksaan direncanakan 36 obyek Pemeriksaan yang meliputi 21 Kecamatan, 14 Kantor/Dinas/Badan Tingkat Kabupaten dan 1 Perusahaan Daerah. Indikator keberhasilannya kegiatan Pemeriksaan Reguler berdasarkan PKPT tahun 2003 ini adalah terperiksanya 36 unit kerja obyek Pemeriksaan disertai 36 laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya di targetkan mencapai 80 %.

- 2) Kegiatan Pemeriksaan Insidentil ke Cabang Dinas P dan K, Puskesmas, SLTP/SMU Negeri.

Sasaran obyek Pemeriksaan Insidentil ini direncanakan pada 84 Unit kerja obyek Pemeriksaan. Indikator keberhasilan kegiatan Pemeriksaan Insidentil ini adalah terjangkaunya obyek pemeriksaan sejumlah 84 Unit kerja tersebut.

- 3) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan.

Sasaran obyek pemeriksaan kasus-kasus pengaduan ini adalah kasus pengaduan, baik pengaduan yang langsung dari masyarakat, lewat Pers dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Bupati Lamongan yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti sebelumnya. Indikator keberhasilan kegiatan pemeriksaan kasus-kasus Pengaduan ini ditargetkan 75 % dari jumlah kasus pengaduan yang masuk bisa diperiksa.

- 4) Kegiatan peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.

Sasaran kegiatan Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah ini diarahkan pada pemeriksaan kegiatan seluruh unit kerja Perangkat Daerah yakni Kantor, Dinas, Badan, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun Sekretariat DPRD yang didanai dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2003 meliputi Pemeriksaan Keuangan maupun Pemeriksaan Kinerjanya dan Pemeriksaan akhir tahun anggaran. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah ini di danai Rp. 300.000.000,-- Indikator keberhasilannya adalah terperiksanya seluruh kegiatan pada Unit Kerja Kantor, Dinas,

Badan, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam tahun 2003 yang kegiatannya tersebut didanai dari APBD Kabupaten Lamongan.

4. Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan, Kegiatannya :

1) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Publik.

Sasaran kegiatan pemantauan Pelayanan Publik ini adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang memberikan pelayanan Publik dengan target sasaran 65 unit kerja pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan dana sejumlah Rp. 225.000.000,-- Indikator keberhasilannya adalah terpantaunya sejumlah 65 unit kerja yang memberi pelayanan masyarakat di Kabupaten Lamongan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 adalah sebagai Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 kepada Bupati Lamongan atas pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi dibidang Pengawasan.

Dalam Renstra Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006, telah ditetapkan Rencana Kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 dan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan tahun 2003 tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN KE II (2003)

1. Pelaksanaan Program / kegiatan tahun 2003

a. Pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur.

1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan APIP

Pembinaan dan Peningkatan APIP Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 :

(1) Mengikut sertakan 6 (enam) orang Staf Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Dalam pelatihan Work Shop di Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi / Pusat sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS Angkatan V tahun 2003 tanggal 24 s/d 28 Pebruari 2003 di Jakarta 1 (satu) orang.
- Diklat Verifikasi JFA tanggal 5 s/d 25 Maret di BPKP Perwakilan Jawa Timur 1 (satu) orang
- Work Shop Audit Belanja Pembangunan tanggal 13 s/d 15 April 2003 di Hotel Utami Sidoarjo 1 (satu) orang.

- Diklat Manajemen Pengelola Barang Inventaris Angkatan I tahun 2003 tanggal 11 s/d 24 Juni 2003 di Lamongan 1 (satu) orang.
- Work Shop Audit Pendapatan Daerah tanggal 5 s/d 7 Agustus 2003 di Hotel Utami Sidoarjo 1 (satu) orang.
- Work Shop Pemeriksaan Pengairan Bina Marga dan Tera tanggal 14 s/d 17 Desember 2003 di Hotel Utami Sidoarjo 1 (satu) orang.

(2) Bimbingan Teknis Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta Pelaksanaanya sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan tanggal 8 s/d 12 Desember 2003.
- Tempat di Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
- Peserta menurut rencana 30 orang dalam pelaksanaan 47 orang terdapat Peningkatan jumlah peserta 17 orang yakni 5 orang dari Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dan 12 orang dari Satuan Tiga terdiri dari 6 orang dari BKBD, 3 orang dari Bappeda dan 3 orang dari Bagian Pembangunan.
- Instruktur 3 (tiga) orang seluruhnya dari BPK Perwakilan III Yogyakarta .

b. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor tahun 2003

Pengadaan peralatan kantor tahun 2003 guna mendukung kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana sebagai berikut :

- 2 (dua) Unit Computer;
- 2 (dua) buah Filling Cabinet;
- 1 (satu) buah Tabung PMK;
- 1 (satu) Meja Kerja Eselon II;
- 10 (sepuluh) Meja Rapat;
- 40 (empat puluh) Kursi Rapat.

c. *Pelaksanaan Program Pendayagunaan Sistim dan Pengawasan kegiatannya meliputi :*

1) *Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Reguler berdasar PKPT tahun 2003.*

(1) Target cbyek Pemeriksaan = 36 obrik.

(2) Realisasi Pemeriksaan = 36 obrik.

Sasaran Pemeriksaan terinci sebagai berikut :

- Kantor Camat 21 obrik/LHP = 473 temuan.

- Kantor/Dinas/Badan 14 obrik/LHP = 215 temuan.

- Perusahaan Daerah 1 obrik/LHP = 19 temuan.

Jumlah 36 obrik/LHP = 707 temuan.

(3) Dari kegiatan 707 temuan tersebut berdasarkan Rangking kelompok temuan terdiri :

➤ Kelemahan administrasi = 462 temuan.

➤ Hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok = 121 temuan.

➤ Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja-
Yang telah ditetapkan = 53 temuan.

➤ Kewajiban penyeteroran kepada Negara/Daerah = 31 temuan.

➤ Pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan-
Undangan yang berlaku = 29 temuan.

➤ Temuan lain-lain = 11 temuan.

(4) Berdasarkan Rangking jumlah temuan menurut penyebabnya :

➤ Kelemahan dalam Prosedur = 384 temuan.

➤ Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan = 152 temuan.

➤ Kelemahan dalam pembinaan personil = 65 temuan.

➤ Kelemahan dalam kebijakan = 49 temuan.

➤ Kelemahan dalam rencana = 33 temuan.

➤ Kelemahan dalam organisasi = 12 temuan.

➤ Kelemahan dalam pengawasan Internal = 12 temuan.

(5) Berdasarkan Rangkang jumlah Rekomendasi yang diajukan atas temuan menurut kode rekomendasi :

- Rekomendasi bersifat penegakan aturan = 649 rekomendasi.
- Rekomendasi bersifat peningkatan efektifitas = 20 rekomendasi.
- Rekomendasi bersifat peningkatan kehematan = 12 rekomendasi.
- Rekomendasi bersifat peningkatan efisiensi = 6 rekomendasi.

(6) Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan .

Dari sejumlah 36 Laporan Hasil Pemeriksaan pada 36 obyek Pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2003, Instansi / Unit kerja obyek pemeriksaan yang telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sejumlah 28 Unit kerja atau 77,7 % dan yang belum menindak lanjutinya ada 8 Unit kerja atau 22,3 % Hal tersebut disebabkan oleh :

- a) Pemeriksaan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dan Nopember 2003.
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Unit Kerja obyek Pemeriksaan pada pertengahan Desember 2003 dan Minggu terakhir bulan Desember 2003 sehingga pada akhir Desember 2003 tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan belum tercukupi.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Insidental ke Puskesmas, Cabang Dinas P & K dan SLTP/SMU Negeri dalam tahun 2003.

Dalam tahun 2003 Pemeriksaan Insidental dengan sasaran obrik Puskesmas, Cabang Dinas P & K dan SLTP/SMU Negeri dapat menjangkau 21 Kecamatan atau 84 obyek Pemeriksaan yang meliputi :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| (1) Puskesmas 26 obrik/LHP | = 265 temuan. |
| (2) Cabang Dinas P & K 20 obrik/LHP | = 212 temuan. |
| (3) SLTP Negeri 31 obrik/LHP | = 334 temuan. |
| (4) SMU Negeri 7 obrik/LHP | = 73 temuan. |
| JUMLAH 84 LHP | = 884 temuan. |

Dari jumlah 884 temuan tersebut dikelompokkan :

- Aspek Personalia = 366 temuan.
- Aspek Keuangan = 314 temuan.
- Aspek Material = 204 temuan.

3) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kasus Pengaduan tahun 2003 :

(1) Jumlah Kasus/Pengaduan yang masuk Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 sejumlah 53 Kasus/Pengaduan.

(2) Sumber informasi pengaduan diperoleh dari :

- Surat Pengaduan langsung dari Masyarakat = 26 kasus.
- Guntingan Pers = 4 kasus.
- Anggota DPRD Lamongan = 1 kasus.
- Pelimpahan MENPAN = 1 kasus.
- Pelimpahan Irjen Diknas = 1 kasus.
- Pelimpahan dari Instansi lain = 19 kasus.

(3) Kasus/Pengaduan yang telah diperiksa sejumlah 39 kasus atau 73,5 % dari kasus/Pengaduan yang masuk sejumlah 53 kasus dan dari 39 kasus yang diperiksa tersebut sejumlah 26 kasus/Pengaduan atau 66 % terbukti.

(4) Dari 26 kasus yang setelah diperiksa terbukti yang menyangkut PNS sejumlah 24 kasus.

(5) Dari sejumlah 24 PNS yang terbukti telah melanggar Disiplin PNS telah direkomendasikan / dikenai sanksi hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS dengan Jenis Hukuman Disiplin PNS berupa :

a. Jenis Hukuman Disiplin Berat sejumlah 13 PNS terdiri :

(1) Penurunan pangkat 10 (sepuluh) PNS meliputi :

- DPU Cipta Karya = 1 orang PNS.

- Dinas P dan K = 2 orang PNS.
- Dinas Kesehatan = 3 orang PNS.
- Kantor Perindustrian dan Perdagangan
(Deperindag dan Koperasi) = 1 orang PNS.
- Kantor Perlindungan Masyarakat
(Badan Kesbang dan Linmas) = 1 orang PNS.
- Kantor Camat Modo = 1 orang PNS.
- Kantor Camat Kembangbahu = 1 orang PNS.

(2) Pembebasan dari Jabatan 2 (dua) orang PNS pada Unit kerja :

- Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan = 1 orang PNS.
- Kantor Camat Ngimbang = 1 orang PNS.

(3) Pemberhentian sebagai PNS sebanyak 1 (satu) orang PNS pada Unit kerja Kantor Camat Tikung.

b. Jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa Tegoran tertulis 10 orang PNS yang terdiri :

- Dinas P dan K Kabupaten Lamongan = 7 orang PNS.
- Dinas Kesehatan = 1 orang PNS.
- Kantor Kesos (Dinas KB & Kesos) = 1 orang PNS.
- Kantor Camat Sukodadi = 1 orang PNS.

c. Dimutasi pada eselon yang sama tidak memimpin Unit kerja 1 (satu) orang PNS pada Unit Kerja Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

d. Selain pemberian sanksi Hukuman disiplin PNS tersebut diatas terdapat pembinaan terhadap PNS yakni PNS yang dilaporkan / diadukan namun tidak terbukti/tidak cukup bukti yang terdiri :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan = 7 Orang PNS
- Dinas Kesehatan = 1 Orang PNS
- Kantor Kesos (Dinas KB dan Kesos) = 1 Orang PNS

- e. Dari 26 Kasus/Pengaduan yang setelah diperiksa terbukti, terdapat 1 (satu) kasus pengaduan yang menyangkut Kepala Desa dan satu orang Perangkat Desa dengan jenis hukuman sebagai berikut :
- Peringatan tertulis 1 (satu) Kepala Desa
 - Pemberhentian dari Jabatan Perangkat Desa satu orang.

(6) Kasus/pengaduan yang masih dalam proses Pemeriksaan sejumlah = 14 kasus / Pengaduan.

(7) Ditinjau dari Profil kasus/pengaduan terdiri :

- Kepegawaian/ketenaga kerjaan = 27 kasus.
- Pelayanan Masyarakat = 8 kasus.
- Penyalahgunaan Wewenang = 12 kasus.
- Hukum/peradilan = 6 kasus.

4) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah.

a) Sasaran kegiatan ini adalah pemeriksaan kegiatan-kegiatan pada seluruh unit kerja Perangkat Daerah meliputi Kantor, Dinas, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang meliputi :

- (1) Jumlah kegiatan tahun 2003 = 588 kegiatan
- (2) Jumlah kegiatan yang telah diperiksa = 588 kegiatan
- (3) Dari kegiatan yang telah diperiksa terdapat = 1.072 temuan

b) Dari sejumlah 1.072 temuan berdasarkan rangking kelompok temuan terdiri :

- Kelemahan Administrasi = 426 temuan
- Pelanggaran terhadap prosedur dan tata Kerja yang telah ditetapkan = 291 temuan
- Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Anggaran = 116 temuan
- Hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok = 80 temuan
- Hambatan terhadap kelancaran proyek = 63 temuan

- Pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku = 30 temuan.
- Pencapaian tujuan belum efektif = 21 temuan.
- Pelaksanaan tugas belum efisien = 14 temuan.
- Hambatan kelancaran program pembangunan = 10 temuan.
- Temuan Lainnya = 10 temuan
- Kewajiban setor kepada daerah = 7 temuan.
- Pelaksanaan pengadaan sumber daya belum hemat = 3 temuan
- Proaktivitas masih rendah = 1 temuan

c) Berdasarkan Rangking kelompok Rekomendasi :

- Rekomendasi bersifat penegakan Aturan = 743 Rekomendasi
- Rekomendasi bersifat peningkatan Efisiensi/Produktivitas = 100 Rekomendasi
- Rekomendasi bersifat peningkatan kehematan = 55 Rekomendasi
- Rekomendasi bersifat Peningkatan Efektifitas = 37 Rekomendasi
- Rekomendasi bersifat Finansial = 21 Rekomendasi
- Rekomendasi lain-lain = 14 Rekomendasi

d) Pelaksanaan Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan.

1) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pelayanan Publik tahun 2003.

(1) Target Sasaran Pemantauan Pelayanan Publik tahun 2003 = 65 Unit kerja.

(2) Realisasi pemantauan 62 Unit Kerja yang meliputi :

- a. Kantor Camat (Pelayanan Akte Tanah dan Kependudukan) = 27
- b. Puskesmas (Pelayanan Kesehatan) = 31
- c. Kantor Capil dan Kependudukan (Pelayanan KTP) = 1
- d. Kantor Perijinan (Pelayanan Perijinan) = 1
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Ijin trayek, -

Ijin usaha angkutan kendaraan bermotor dan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor)	=	1
f. BP RSD (Pelayanan Umum Kesehatan)	=	1

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagai Dasar untuk menilai keberhasilan atau Kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan dalam tahun 2003, perlu dilaksanakan Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja dimaksud merupakan Hasil penilaian pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Sebagaimana Tugas Pokok Badan Pengawas Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Desentralisasi di Bidang Pengawasan, Maka sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ditentukan oleh sejauh mana jangkauan Pengawasan ke kantor/Dinas/Badan/Instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan. Dengan Demikian dalam menghitung prosentase pencapaian Rencana tingkat kegiatan memperhatikan Karakteristik " Semakin Tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin Baik "

Maka Rumus yang dipergunakan dalam menghitung Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kejadiannya adalah :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan memakai Rumus tersebut diatas Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 sebagaimana terinci dalam Form PKK berikut :

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2003**

INSTANSI : BADAN PENGAWAS KAB. LAMONGAN

FORMULIR PKK

PROGRAM	KEGIATAN					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	KETERANGAN
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur	Pembinaan dan Peningkatan APIP	1. Masukan :					
		- Dana	Rupiah	91.850.000,-	91.850.000,-		Peserta Bintek Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja tanggal 8 s/d 12 Desember 2003 sejumlah 47 orang terinci sebagai berikut : > 35 orang Bawasda > 6 orang BKBD > 3 orang Bappeda > 3 orang Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan
		- SDM Peserta Penyelenggara Pembimbing	Orang	30	35	116 %	
			30	30	100 %		
			10	10	100 %		
	3	3	100 %				
2. Keluaran :	Orang	30	35	116 %			
3. Hasil :	Orang	30	35	116 %			
4. Manfaat :	Orang	30	35	-			
5. Dampak Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan	-	-	-	-			
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Pengadaan Peralatan Kantor	1. Masukan :					
		Dana	Rupiah	37.350.000,-	37.350.000,-	100 %	
2. Keluaran :	Unit/Brg						
Jenis Peralatan Kantor yang dibeli	- Satu tabung PMK	1 Tab. PMK	100 %				
	- Dua buah Filling Cabinet	2 FC.					
	- Dua Unit Computer	2 Computer					
	- Satu Meja Kerja	1 Meja Kerja					

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pendayagunaan Sistim dan Pengawasan	1. Pemeriksaan Reguler berdasar PKPT tahun 2003 2. Pemeriksaan Insidentil ke Puskesmas, Cabang Dinas P dan K dan SLTP/SMU Negeri	3. Hasil : Tambahnya Peralatan Kantor	Unit/buah	- Sepuluh Meja Rapat - Empat Puluh Kursi Lipat - Satu tabung PMK - Dua buah Filling Cabinet - Dua Unit Computer - Satu Meja Kerja - Sepuluh Meja Rapat - Empat Puluh Kursi Lipat	10 Meja Rapat 40 Kursi Lipat 1 Tab. PMK 2 FC. 2 Computer 1 Meja Kerja 10 Meja Rapat 40 Kursi Lipat	100 %	
		4. Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	-	-	-	
		1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	27.000.000,-	27.000.000,-	100 %	
		2. Keluaran : Kertas Kerja Pemeriksaan.	Berkas	36	36	100 %	
		3. Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan.	Berkas Laporan	36	36	100 %	
		4. Manfaat : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Prosentase	80 %	77,7 %	97,1 %	
		5. Dampak : -	-	-	-	-	
		1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	23.100.000,-	23.100.000,-	100 %	
		2. Keluaran : Kertas Kerja Pemeriksaan.	Berkas	84	84	100 %	
		3. Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan.	Berkas Laporan	84	84	100 %	
4. Manfaat : Tindak Lanjut LHP	Prosentase	80	90	112,5 %			
5. Dampak : -	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	
4. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan	3. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan	1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	2.535.000,-	2.353.000,-	100 %		
		2. Keluaran : Berita Acara Pemeriksaan.	Prosentase	80	73,5	91,8 %		
		3. Hasil : Laporan/Rekomendasi	Prosentase	80	73,5	91,8 %		
		4. Manfaat : Bahan Pertimbangan Pengambilan Tindakan.	Prosentase	80	73,5	91,8 %		
		5. Dampak : Meningkatkan Disiplin PNS.	-	-	-	-		
	4. Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	300.000.000,-	300.000.000,-	100 %		
		2. Keluaran : Kertas Kerja Pemeriksaan	Tim	5	5	100%		
		3. Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan	Berkas	251	588	234,2 %		
		4. Manfaat : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Berkas	251	588	234 %		
		5. Dampak : -	Prosentase	80	75	93,75 %		
	5. Dampak : -	5. Dampak : -	1. Masukan : Dana/SDM	Rupiah	225.000.000,-	225.000.000,-	100 %	
			2. Keluaran : Hasil Pemantauan	Unit Kerja	65	62	95,3 %	
			3. Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan	Berkas	65	62	95,3 %	
			4. Manfaat : Tindak Lanjut Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	laporan	65	62	95,3 %	
			5. Dampak : Meningkatkan Kepuasan Pelanggan	Prosentase	60	55	91,6 %	

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Pengukuran pencapaian Sasaran merupakan Hasil Penilaian pada Indikator sasaran Sebagaimana diuraikan dalam pengukuran kinerja kegiatan tersebut diatas, dalam menghitung Prosentase Pencapaian Rencana tingkat capaian sasaran dapat menggunakan Karakteristik bahwa " Semakin Tinggi Realisasi Pencapaian Sasaran Menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin Baik " Dengan demikian Rumus yang digunakan dalam menghitung prosentase Pencapaian Rencana tingkat Capaian Sasaran ini adalah :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan memakai Rumus tersebut diatas Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 sebagaimana terinci dalam Form PPS berikut :

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2003**

INSTANSI : BADAN PENGAWAS KAB. LAMONGAN

FORMULIR : PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan Kualitas SDM Pengawasan yang di dukung Sarana dan Prasarana yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan 30 orang ➤ Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pengawasan 	30	35	116,6	Peserta Bintek Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja tgl. 8 s/d 12 Desember 2003, 47 Orang terdiri : <ul style="list-style-type: none"> ➤ 35 orang Bawasda ➤ 6 orang BKBD ➤ 3 orang Bappeda ➤ 3 orang Bagian Pembangunan Setda Kab. Lamongan.
2. Diperolehnya Hasil Pengawasan yang berkesinambungan di sertai meningkatnya tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 80 %.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 	30	75	93,75	
3. Terhindarnya Tumpang tindih Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Kejadian tumpang tindih Pengawasan 	0	0	100 %	
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Jumlah Instansi Pemerintah yang menyusun I.AKIP 	110	100	100 %	
5. Terwujudnya Pengawasan pada setiap Unit Kerja Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentase Pengawasan terhadap seluruh Unit Kerja Pe. angkat Daerah di Kabupaten Lamongan. 	100	100	100 %	
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas Pelayanan Masyarakat pada Unit kerja yang di pantau. 	65	62	95,3 %	

C EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.

Dari Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian sasaran tersebut diatas dapat di Evaluasi sejauhmana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan melaksanakan Rencana Kinerjanya tahun 2003 dalam upaya Pencapaian tujuan, Sasaran, Misi dan Visinya. Adapun untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut dengan menggunakan Skala Pengukuran sebagai berikut :

Nilai = 80 Keatas = Berhasil
 60 s/d 79 = Cukup Berhasil
 0 s/d 59 = Kurang Berhasil

Selanjutnya dari Skala Pengukuran tersebut Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2003 dapat di Evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan .

Untuk mengetahui Hasil Evaluasi Kinerja kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 dapat d lihat pada Tabel I Berikut :

**EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
 BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003**

Tabel I

No	Jenis kegiatan	Target Rencana	Realisasi Pencapaian	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan APiP	30	35	166 %	Berhasil
2	Pengadaan Peralatan Kantor	100	100	100 %	Berhasil
3	Pemeriksaan Reguler (PKPT) dan Tindak Lanjut LHP	36	36	100 %	Berhasil
4	Pemeriksaan Insidentil	80	77,7	97,1 %	Berhasil
5	Pemeriksaan Kasus-kasus	84	84	100 %	Berhasil
		80	73,5	91,8 %	Berhasil

1	2	3	4	5	6
6	Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	251	588	234,2 %	Berhasil
7	Pemantauan Pelayanan Publik	65	62	95,3 %	Berhasil

2. Evaluasi Pencapaian Sasaran.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN

Tabel 2

No	Jenis Sasaran	Target Rencana	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Sasaran	Ket.
1	Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	30	35	116,6 %	Berhasil
2	Diperolehnya hasil Pengawasan yang berkesinambungan di sertai meningkatnya tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	80	75	93,75 %	Berhasil
3	Terhindarnya tumpang tindih Pengawasan	100	100	100 %	Berhasil
4	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	100	100 %	Berhasil
5	Terwujudnya Pengawasan se-tiap Unit Kerja Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah	100	100	100 %	Berhasil
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat	65	62	95,3 %	Berhasil

D ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003.

Badan Pengawas Kabupaten Lamongan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi di Bidang Pengawasan. Tugas Pokok di Bidang Pengawasan inilah merupakan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 6 tahun 2000. Dalam menjaiankan fungsi Pengawasan tersebut Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah menyusun Renstra 2002 – 2006. Dalam tahun ke II (2003) Rencana Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan telah tersusun sebagaimana tertuang dalam Form RKT tahun 2003 dan telah dilaksanakan dan telah di Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 (PKK) serta Tabel 2 (PPS), dan selanjutnya dalam menganalisa Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2003 ini perlu diuraikan tentang sejauh mana keberhasilan atau kegagalan, hambatan atau kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang diambil oleh Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai berikut .

1. *Keberhasilan / Kegagalan*

Dari ke 7 (tujuh) kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 setelah dilaksanakan pengukuran Kinerja sebagaimana tertera dalam Tabel 1 menunjukkan prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian Kegiatan rata-rata diatas 80 %. Selanjutnya setelah di ukur melalui Skala Pengukuran Kinerja yang ditetapkan bahwa prosentase pencapaian rencana tingkat Capaian kegiatan mencapai 80 % ke atas termasuk kategori "**Berhasil**"

Adapun alasan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 sebagai berikut :

- 1) Adanya Landasan kerja serta mandat yang jelas sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2000 serta Keputusan Bupati Lamongan Nomor 26 tahun 2001.

- 2) Telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Kabupaten Lamongan Tahun 2002 – 2006 dan Rencana Kegiatan Tahunan mulai Tahun ke I (2002) sampai dengan Tahun Ke V (2006) dalam Renstra Tersebut.
- 3) Tersediannya Dana serta sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Lamongan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat di banding dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun masih relatif kurang.
- 4) Potensi SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan yang kuantitasnya minimal digerakkan secara maksimal dalam operasional tugas-tugas Pengawasan sehubungan semakin bertambahnya obyek Pengawasan di era Otonomi Daerah.
- 5) Berfungsinya sistim Pengendalian Managemen yang mantap dari Pimpinan melalui forum Rapat Staf mingguan secara rutin.

2. Hambatan / Permasalahan yang dihadapi.

Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 adalah :

- 1) Diberlakukannya Anggaran Kinerja mulai tahun 2003 berakibat Aturan-aturan dalam pengelolaan Keuangan sebagai Kriteria di bidang Pengawasan ikut berubah pula, sehingga menjadi tantangan bagi Pengawas untuk segera mampu memahami aturan-aturan baru tersebut guna melakukan Pengawasan dan Pembinaan kepada para Pelaksana di masing-masing unit kerja .
- 2) Dalam kegiatan Pemantauan Pelayanan Publik masalah yang dihadapi adalah Output yang dihasilkan dalam Pelayanan Publik tidak mudah diukur sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas Pelayanan Publik itu dicapai sulit untuk mengukurnya.
- 3) Tenaga, dana dan Sarana yang Relatif masih kurang untuk Operasional tugas-tugas Pengawasan.

- 4) Dalam Penanganan Kasus/Pengaduan masalah utama yang dihadapi adalah kurang tanggapnya pimpinan Instansi unit kerja yang membawahi PNS yang diadukan. Sehingga langkah awal penanganan kasus tersebut lamban dan sering terlambat, disamping itu penanganan kasus memang memerlukan waktu yang relatif panjang untuk pemeriksaanya dengan Instansi terkait.

3. Langkah Antisipasi yang akan / di ambil untuk menyelesaikan hambatan / masalah tersebut adalah.

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan sebagai langkah antisipasi Reformasi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pengelolaan Anggaran Kinerja lewat Bimbingan Teknis Pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Kinerja bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta yang diselenggarakan tanggal 8 sampai dengan 12 Desember 2003 di Lamongan.
- 2) Mendayagunakan semaksimal mungkin SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam tugas-tugas Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai langkah antisipasi terhadap semakin meningkatnya Pengawasan Legislatif dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Memanfaatkan Dana, Sarana dan Prasarana yang ada dan sangat terbatas sehemat mungkin. Sebagai langkah antisipasi jangkuan wilayah serta obyek Pemeriksaan yang cukup luas di Kabupaten Lamongan.
- 4) Menyusun / merevisi jadwal Pemeriksaan yang tertuang dalam Renstra setiap tahun disesuaikan dengan kondisi yang ada agar sasaran Pemeriksaan lebih terarah.
- 5) Dalam Penanganan kasus-kasus pengaduan, koordinasi dengan Instansi terkait lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi berlarut-larutnya penanganan kasus pengaduan tersebut.

E AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2003

Perincian Rencana Penggunaan Kas	Jumlah Menurut Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5
Belanja Administrasi Umum				
2.02.07.1.1.03.01 1	507.446.000,00	507.446.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.02 1	51.981.000,00	51.981.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.03 1	119.952.000,00	119.952.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.05 1	33.165.000,00	33.165.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.06 1	32.166.000,00	32.166.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.07 1	22.449.000,00	22.449.000,00	-	-
2.02.07.1.1.03.08 1	25.000,00	25.000,00	-	-
2.02.07.1.1.06.01 1	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2.02.07.1.1.06.02 1	10.080.000,00	10.080.000,00	-	-
2.02.07.1.1.06.04 1	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-
2.02.07.1.1.07.01 1	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-
2.02.07.1.1.07.02 1	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-
2.02.07.1.2.01.01 1	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
2.02.07.1.2.01.02 1	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-
2.02.07.1.2.01.03 1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2.02.07.1.2.01.04 1	750.000,00	750.000,00	-	-
2.02.07.1.2.01.05 1	250.000,00	250.000,00	-	-
2.02.07.1.2.02.01 1	7.500.000,00	7.318.160,00	181.840,00	-
2.02.07.1.2.02.02 1	5.000.000,00	4.905.595,00	94.405,00	-
2.02.07.1.2.02.03 1	686.000,00	574.560,00	111.440,00	-
2.02.07.1.2.02.04 1	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
2.02.07.1.2.03.01 1	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
2.02.07.1.2.03.02 1	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-

	1	2	3	4	5
2.02.07.1.2.05.02	1	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
2.02.07.1.2.05.03	1	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
2.02.07.1.3.01.01	1	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-
2.02.07.1.3.01.02	1	25.660.000,00	25.660.000,00	-	-
2.02.07.1.3.01.03	1	240.000,00	240.000,00	-	-
2.02.07.1.3.01.04	1	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
2.02.07.1.4.01.01	1	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
2.02.07.1.4.01.04	1	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
2.02.07.1.4.02.01	1	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-
2.02.07.1.4.03.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2.02.07.1.4.03.03	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.02.07.1.4.03.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2.02.07.1.4.03.05	1	500.000,00	500.000,00	-	-
2.02.07.1.4.04.01	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Belanja Opr. & Pemeliharaan					
2.02.07.2.1.01.01	1	180.662.750,00	180.662.750,00	-	-
2.02.07.2.2.01.05	1	29.212.250,00	29.212.250,00	-	-
2.02.07.2.2.02.02	1	73.375.000,00	73.375.000,00	-	-
2.02.07.2.2.02.03	1	4.043.750,00	4.043.750,00	-	-
2.02.07.2.2.02.05	1	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-
2.02.07.2.2.02.06	1	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
2.02.07.2.2.03.01	1	32.565.000,00	32.565.000,00	-	-
2.02.07.2.2.03.02	1	1.881.250,00	1.881.250,00	-	-
2.02.07.2.2.05.02	1	40.920.000,00	40.920.000,00	-	-
2.02.07.2.3.01.01	1	201.740.000,00	201.740.000,00	-	-
2.02.07.3.12.01.07	1	500.000,00	500.000,00	-	-
2.02.07.3.12.01.08	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.02.07.3.12.03.01	1	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
2.02.07.3.12.04.01	1	18.850.000,00	18.850.000,00	-	-
Total		1.619.050.000,00	1.599.812.315,00	387.685,00	-

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja efisiensi.

Sesuai dengan Realisasi Alokasi Dana tahun 2003 (Input) dibandingkan dengan Output dapatlah dijadikan acuan untuk melakukan penilaian atas efisiensi kegiatan Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003, yang dapat di lihat dari kondisi sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Output tanpa kenaikan Input, kondisi ini terdapat pada kegiatan :
 - (1) Pemeriksaan Reguler (PKPT) tahun 2003, dengan Input yang sama dengan tahun 2002 baik dana maupun tenaga pengawas Outputnya 36 Unit kerja terdapat kenaikan 3 obrik atau 9 % dibanding dengan tahun 2002 yang Outputnya 33 obrik.
 - (2) Pemeriksaan Insidental tahun 2003 dengan Input yang sama dengan tahun 2002 Outputnya 84 obrik, naik 2 obrik atau 2 % dibanding Output tahun 2002 sejumlah 82 obrik.
 - (3) Pemeriksaan Kasus/Pengaduan dengan Input yang sama dengan tahun 2002 Outputnya 39 ada kenaikan 4 atau 11 % dibanding Output tahun 2002 sejumlah 35.
- 2) Terjadi Peningkatan Output yang sebanding dengan kenaikan Input kondisi ini terdapat pada kegiatan Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah. Dalam tahun 2002 Input kegiatan ini seratus juta rupiah dengan Output 288 proyek. Adapun untuk tahun 2003 Input naik menjadi tiga ratus juta rupiah dan Outputnya 588 kegiatan yang diperiksa dua kali dalam satu tahun setiap kegiatan tersebut sehingga sama halnya dengan memeriksa 1176 kegiatan
- 3) Dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan Kantor penetapan kualitas dan kuantitas barang telah dilakukan dan telah sesuai dengan Standar sebagaimana Keputusan Bupati Lamongan No. 188/113/413.013/2003 tanggal 24 januari 2003, tentang patokan harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2003.
- 4) Pemanfaatan barang dilakukan sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 merupakan Laporan Pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Pengawas tahun kedua dari Perencanaan Strategis Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2002-2006.

Dari hasil evaluasi kinerja tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan dalam tahun 2003, meliputi kegiatan :

1) Kegiatan Pembinaan APIP.

Pembinaan APIP sesuai Rencana peserta di targetkan 30 orang, Realisasi sejumlah 35 orang sehingga prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian kegiatan mencapai 116 %. Dengan demikian diharapkan dari 35 orang SDM Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tersebut setelah dibimbing secara Teknis kemampuan atau kualitasnya dalam bidang pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sudah barang tentu akan meningkat pula.

2) Kegiatan pengadaan peralatan kantor telah dilaksanakan sesuai dengan target rencana dan prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian kegiatan 100 %, diharapkan dengan adanya tambahan sarana / peralatan kantor tersebut akan lebih menunjang kelancaran tugas-tugas Pengawasan berikutnya.

3) Kegiatan Pemeriksaan Reguler berdasar PKPT tahun 2003 dari target rencana sasaran obyek Pemeriksaan 36 obrik dapat terealisasi semua sehingga prosentase pencapaian Rencana Tingkat capaian kegiatannya 100 %. Mengingat kemampuan jumlah tenaga Pengawas dalam bentuk Tim yang terdiri dari semua Bidang yang ada di Badan Pengawas hanya 3 (tiga) Tim, Namun dalam tahun 2003 mampu menyelesaikan 36 obrik Pemeriksaan ada kenaikan 3 obrik di banding dengan tahun 2002 atau meningkat 9 %.

Adapun tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang di targetkan 80 prosen terealisasi 77,7 prosen sehingga prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan mencapai 97,1 %. Hal

tersebut disebabkan Pemeriksaan dalam bulan Oktober dan Nopember 2003 Laporan Hasil Pemeriksaannya terkirim dalam pertengahan sampai dengan minggu terakhir bulan Desember 2003 sehingga pada saat di evaluasi akhir bulan Desember 2003 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tersebut belum dilaporkan oleh Instansi obrik.

4) Kegiatan Pemeriksaan Insidentil.

Target Rencana Kegiatan Pemeriksaan Insidentil tahun 2003 sejumlah 84 obrik dan realisasi pencapaiannya 84 obrik, sehingga prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan mencapai 100 %. Bila dibanding dengan tahun 2002 kegiatan ini ada peningkatan 2 (dua) obrik atau 2,4 %.

5) Kegiatan Pemeriksaan kasus pengaduan kegiatan ini dalam tahun 2003 ditargetkan 80 prosen dari kasus pengaduan yang masuk namun realisasi pencapaiannya 73,5 prosen sehingga prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan mencapai 91,8 %. Hambatan pelaksanaan kegiatan ini adalah kurang tanggapnya serta lambannya Instansi terkait dalam menanggapi dan melaporkannya kepada yang berwenang terhadap penyelesaian kasus tersenut.

6) Kegiatan peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah tahun 2003.

Seiring dengan adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari APBD Rutin dan Pembangunan menjadi Anggaran Kinerja terdapat peningkatan kegiatan Instansi unit kerja Perangkat Daerah, Target Rencana tahun 2003 251 dan dalam APBD 2003 terdapat 588 kegiatan yang seluruhnya telah diperiksa, sehingga Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian kegiatan mencapai 234,2 % dan bila di banding dengan tahun 2002 ada kenaikan 300 kegiatan yang diperiksa.

7) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Publik

Target rencana Kegiatan Pemantauan Pelayanan Publik 65 unit kerja yang memberikan pelayanan publik, dari target tersebut terealisasi 62 Unit kerja. Dengan demikian prosentase pencapaian Rencana tingkat Capaian Kegiatan mencapai 95,3 %. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan tenaga sangat terbatas disertai jadwal kegiatan Pemeriksaan yang cukup padat, kegiatan pemantauan pelayanan publik tersebut baru dilaksanakan mulai tahun 2003.

2. Permasalahan utama yang berkaitan dengan Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan :

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003 dalam pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2003 adalah terbatasnya tenaga pengawas maupun sarana dan prasarana pendukung tugas operasional pengawasan. Badan Pengawas Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 Bidang dan tiap bidang terdapat 3 Sub Bidang. Tenaga staf pada masing-masing Sub bidang belum ada kecuali terdapat satu orang tenaga staf di 4 Bidang. Setiap kegiatan Pemeriksaan secara Tim lengkap dari 5 bidang hanya mampu membentuk 3 Tim saja. Padahal kegiatan Pemeriksaan yang direncanakan dalam tahun 2003 meliputi :

1. Pemeriksaan Reguler	=	36 obrik
2. Pemeriksaan Insidentil	=	84 obrik
3. Pemeriksaan Kasus/pengaduan	=	53 kasus
4. Pemeriksaan Kegiatan	=	588 kegiatan
5. Pemantauan Pelayanan Publik	=	65 Unit kerja

3. Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang, antara lain :

- 1) Menperkecil kelemahan dan menghindari ancamana dengan langkah :
 - a) Memanfaatkan Dana dan Sarana yang sangat terbatas sehemat mungkin untuk menjangkau wilayah serta obyek pengawasan yang cukup luas.
 - b) Memanfaatkan SDM Pengawasan sebagaimana kondisi yang ada sekarang seoptimal mungkin untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kegiatan pengawasan legislatif dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang dengan langkah :
Meningkatkan dana, sarana dan prasarana operasional Pengawasan secara bertahap melalui usulan ke APBD Kabupaten Lamongan guna operasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana Kepres No. 74 tahun 2001

- 3) Memakai kekuatan untuk menghindari Ancaman, dengan langkah :
sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2000 Meningkatkan Pengawasan keseluruhan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya perubahan sosial di Bidang Pengawasan.
- 4) Berdasarkan Kegiatan Pemeriksaan tahun 2003 menyusun Jadwal Pemeriksaan tahun 2004 sedemikian rupa agar efektifitas kegiatan pemeriksaan dapat maksimal dengan cara :
 1. Pada awal tahun antara bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2004 Pemeriksaan di fokuskan pada Kecamatan-kecamatan dengan sampling ke desa-desa.
 2. Pada bulan April sampai dengan September tahun 2004 sasaran pemeriksaan di fokuskan ke Kantor, Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah yang melaksanakan kegiatan fisik maupun keuangan. Adapun kantor yang tidak melaksanakan kegiatan fisik belum diperiksa dalam kurun waktu tersebut.
 3. Pada bulan Oktober dan Nopember 2004 kegiatan Pemeriksaan di arahkan pada Kantor Kecamatan.
 4. Pada bulan Desember 2004 Pemeriksaan di fokuskan pada seluruh Unit kerja Perangkat Daerah baik yang melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik guna menunjang kegiatan penyusunan perhitungan APBD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Kabupaten Lamongan tahun 2003, untuk menjadi periksa.

Lamongan, 12 Januari 2004



**KEPALA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN LAMONGAN**

SUPARDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 164 744

**RENCANA STRATEGIK
TAHUN 2002 – 2006**

INSTANSI : Badan Pengawas Kabupaten Lamongan
VISI : Terwujudnya Pemerintahan yang baik
melalui Pengawasan yang Profesional

FORMULIR RS

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
1 Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan yang profesional yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang didukung Sarana dan Prasarana yang memadai	1. Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan. - Peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan. 	1. Mengoptimalkan pendayagunaan sistem Pengawasan fungsional terhadap Instansi Pemerintah / perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan melalui pengawasan Reguler, Insidental maupun khusus.	1. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan	36 Obnk Daftar Terlampir
2 Meningkatkan sistim informasi pengawasan yang kualitatif dan berkesinambungan	2. meningkatnya manajemen Pemerintahan yang baik melalui optimalisasi kinerja yang terarah dan terprogram pada unit-unit kerja / Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah	2. Di perolehnya hasil pengawasan yang berkesinambungan disertai meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 80 %	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang didukung sarana dan Prasarana yang memadai secara bertahap.	2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan	
3 Menumbuhkan komitmen Pemerintah maupun masyarakat terhadap perlunya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.	3. Meningkatnya sistim pengawasan yang profesional secara terprogram dan terarah guna menghindari adanya tumpang tindih Pengawasan	3. Terhindarnya Tumpang tindih Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase kejadian tumpang tindih Pengawasan 	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemantauan / pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik pada Instansi	3. Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur	

1	2	3	4	5	6	7
<p>4 Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap temuan</p> <p>5 Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau perwujudan penyimpanan</p>	<p>4. Mewujudkan pelaporan Hasil Pengawasan yang efektif dan berkualitas</p> <p>5. Meningkatkan Iktim yang mencegah KKN dilingkungan Aparatur Pemerintah</p>	<p>4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>5. Terwujudnya pengawasan pada setiap unit kerja perangkat Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>- Prosentase jumlah Instansi pemerintah yang menyusun Lakip</p> <p>- Prosentase pengawasan terhadap seluruh unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Lamongan</p>	<p>Pemerintah / Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik</p> <p>4. merekomendasikan tindakan-tindakan hukum kepada aparat pemerintah yang terbukti melanggar peraturan</p>	<p>4. Merekomendasikan tindakan hukum kepada aparat pemerintah yang terbukti melanggar peraturan</p>	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2003**

INSTANSI : BADAN PENGAWAS KABUPATEN LAMONGAN

FORMULIR RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	Rencana Tingkat Capaian (Target)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan yang di dukung Sarana dan Prasarana yang memadai	- Peningkat-an jumlah SDM Pengawasan yang mengi-uti Latihan	30	1. Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur	1. Pembinaan dan Peningkatan APIP	1. Masukan : DanaSDM 2. Keluaran Jumlah Peserta BinteK 3. Hasil : Jumlah SDM Bawasda yang menyelesaikan BinteK 4. Manfaat : Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 5. Dampak : Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan	Rupiah Orang Orang Orang Prosen	91.850.000,- 30 orang 30 orang 30 orang -	
	- Prosentase Peingkatan Jumlah Sarana Penukung Tugas Pegaasan	10	2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	2. Pengadaan Peralatan kantor	1. Masukan Dana 2. Keluaran : Jenis Peralatan Kantor yang di beli 3. Hasil ; Tambahnya Perla-tan kantor 4. Manfaat : Peningkatan Ke-lancaran Pelaksanaan Tugas 5. Dampak : Mendukung Ke-lancaran Tugas-tugas Pengawasan	Rupiah Unit/buah Unit/buah Prosentase	Rp.37.350.000,- 1 buah Tab. PMK 2 Unit Computer 2 buah Filling CBT 1 buah meja Kerja 10 meja rapat 40 Kursi Rapat 1 buah Tab. PMK 2 Unit Computer 2 buah Filling CBT 1 buah meja Kerja 10 meja rapat 40 Kursi Rapat 2 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Diperolehnya Hasil Pengawasan yang berkesinambungan di sertai meningkatnya tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Prosentase Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	80 %	3 Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan	3. Pemeriksaan Reguler berdasar PKPT tahun 2003	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : Kantor Kerja 3. Hasil : LHP 4. Manfaat : Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan 5. Dampak : Meningkatnya tertib Administrasi	Rupiah Berkas Berkas Lap Prosentase	27.000.000,- 36 36 80 %	
3 Terhindarnya tumpang tindih Pengawasan	Prosentase kejadian adanya tumpang tindih Pengawasan	0 %	-	4. Pemeriksaan Insidental ke Cabang Dinas P dan K, Puskesmas, SLTP	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : Kertas Kerja Pemrk. 3. Hasil : LHP 4. Manfaat : Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan 5. Dampak : Meringkatnya tertib Administrasi	Rupiah Berkas Berkas Lap Prosentase	23.100.000,- 84 84 80 %	
4 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase Jumlah Instansi Pemerintah yang menyusun LAKIP	80 %	-	5. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 3. Hasil : Laporan Rekomendasi 4. Manfaat : Pengambilan Tindakan 5. Dampak : Meningkatnya tertib Administrasi	Rupiah Prosentase Prosentase	2.535.000,- 80 % 80 % 60 %	
5 Terwujudnya Pengawasan pada setiap unit kerja Perangkat Daerah / penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Prosentase Pengawasan Terhadap seluruh unit kerja Perangkat Daerah di kabupaten Lamongan	100 %	-	6. Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : Kertas Kerja Pemeriksaan 3. Hasil : LHP 4. Manfaat : Tindak lanjut 5. Dampak : -	Rupiah Kertas Kerja Berkas Lap Prosentase	300.000.000,- 251 251 80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat pada Unit Kerja yang di pantau	66 %	4 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawas	7. Pemantauan Pelayanan Publik	1. Masukan : Dana/SDM 2. Keluaran : Hasil Peman-tauan 3. Hasil : LHP 4. Manfaat : Tindak lanjut upaya peningkatan kualitas pelayanan 5. Dampak : Meningkatnya kepuasan pelanggan	Rupiah Unit Kerja Berkas Lap Presentase	- 65 65 60 -	